

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multi dimensional yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2004:21) untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu : meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakatnya, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.

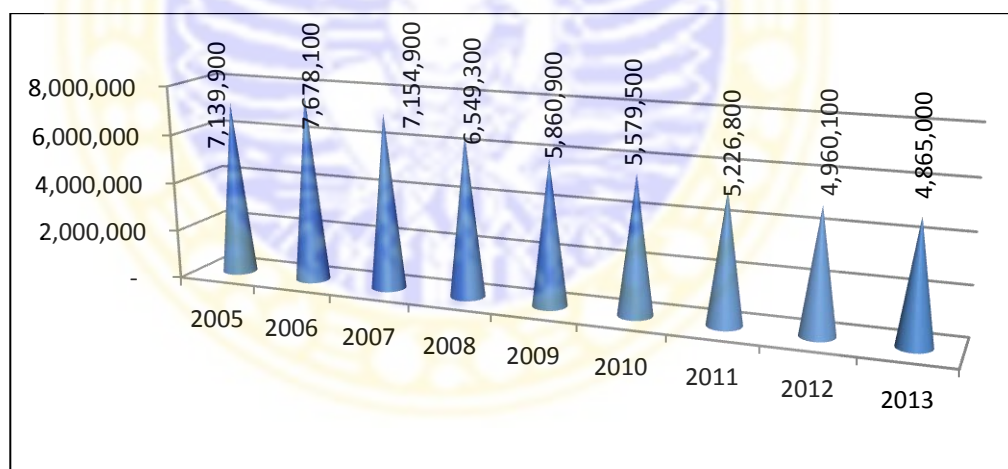
Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), mengurangi kesenjangan pendapatan dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Disisi lain meningkatnya pertumbuhan kadang menjadi sebuah dilema, karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin akan rendah. Hal ini terbukti dari sebagian besar Negara Sedang Berkembang (NSB) di Asia, seperti Indonesia yang mempunyai rata-rata pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi yaitu sekitar 7 persen per tahun tetapi masih mempunyai kesenjangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin yang tinggi yaitu sebesar 28,17 juta orang (Berita Statistik BPS, 2013).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar dan menjadi perhatian serius di negara-negara yang sedang berkembang. Pada beberapa negara yang sedang berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah dibandingkan dengan standar hidup di negara maju. Standar hidup yang rendah tersebut tercermin dari rata-rata pendapatan perkapita per tahunnya antara US\$ 675–2.695, sedangkan rata-rata pendapatan perkapita di negara maju per tahunnya lebih dari US\$ 8.336. (<http://softilmu.blogspot.com/2013/12/pengertian-negara-maju-dan-berkembang-berkembang.html>).

Kemiskinan tidak hanya menjadi fokus masalah nasional di Indonesia tetapi juga menjadi fokus utama dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Masalah penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan permodalan. Masalah lainnya adalah belum optimalnya produktivitas pertanian, rendahnya kesejahteraan masyarakat petani serta kurangnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dimana sekitar 15 juta orang penduduk miskin berada di pedesaan sekitar yang kebanyakan adalah petani, sedangkan sekitar 7 juta orang lagi penduduk miskin ada di perkotaan (BPS Jatim, 2013).

Kondisi ini menjadi isu penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersurat dalam visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam dokumen RPJMD 2009-2014, yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” melalui misi mewujudkan “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Salah satu misi yang dicanangkan adalah melaksanakan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan sehingga sektor pertanian dan industri menjadi basis perencanaan perekonomian ekonomi di Jawa Timur (<http://www.bappeda.jatimprov.go.id>).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim, data diolah.

Gambar 1.1.
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 – 2013

Gambar 1.1. di atas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur selalu berupaya menekan jumlah penduduk miskin dengan berbagai program, diantaranya yaitu dengan mencanangkan program *pro poor* sebagaimana

tersurat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Gambar tersebut juga memperlihatkan tren jumlah penduduk miskin di Jawa Timur terus turun, dimana tahun 2005 tercatat 7,1 juta orang dan terus turun menjadi 4,8 juta orang di tahun 2013.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Jawa (%)
Tahun 2005 – 2013

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DKI Jakarta	6.01	5.95	6.44	6.23	5.02	6.50	6.73	6.53	6.11
Jawa Barat	5.60	6.02	6.48	6.21	4.19	6.20	6.51	6.28	6.06
Jawa Tengah	5.35	5.33	5.59	5.61	5.14	5.84	6.03	6.34	5.81
DI Yogyakarta	4.73	3.70	4.31	5.03	4.43	4.88	5.17	5.32	5.40
Jawa Timur	5.84	5.80	6.11	5.94	5.01	6.68	7.22	7.27	6.55
Banten	5.88	5.57	6.04	5.77	4.71	6.11	6.38	6.15	5.86

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

Deskripsi pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 1.1. di atas, dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,84 persen di tahun 2005 dan mencapai 6,55 persen ditahun 2013, sedangkan Jawa Tengah di tahun 2005 mencapai 5,35 persen dan mencapai 5,81 persen di tahun 2013. Apabila melihat gambaran jumlah penduduk miskin didua provinsi tersebut hampir sama, dimana Provinsi Jawa

Timur pada tahun 2005 sebesar 7,1 juta orang dan menjadi 4,8 juta orang di tahun 2013, sementara Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 jumlah penduduk miskinnya sebesar 6,5 juta orang dan menjadi 4,8 juta orang di tahun 2013. Namun permasalahannya yang patut dilihat adalah laju jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur turun tidak terlalu signifikan. penurunan kemiskinannya hampir sama dengan di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini memberikan suatu gambaran bahwa ada sesuatu yang kurang efektif dari program penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam dengan menganalisis kondisi sektoral di Provinsi Jawa Timur.

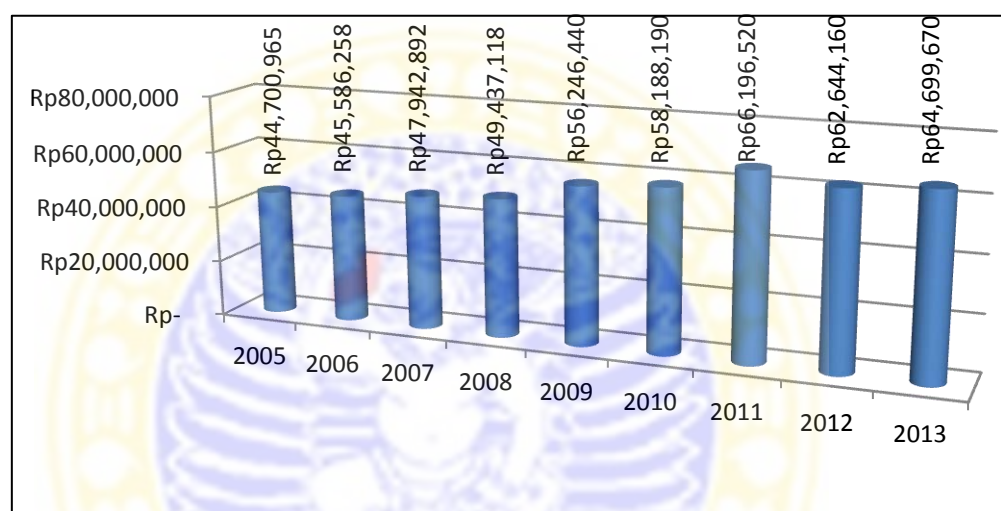
Diterbitkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999/Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999/Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah (Publikasi DJPK Kemenkeu, 2004) . Undang-undang tersebut, memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya penyerahan mandat dari pemerintah pusat kepada daerah dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Boediono (1999:11) sesungguhnya terdapat faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan.

Permasalahan pokok yang ada dalam pembangunan suatu daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*), yaitu dengan mengedepankan potensi sektoral yang unggul. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah terletak pada koordinasi dan keterpaduan, baik keterpaduan antar sektor, antara sektor dengan daerah, antar kabupaten/kota dalam Provinsi, serta antara Provinsi dengan pemerintah pusat, dengan keterpaduan tersebut, berarti akan terjadi kesamaan pandangan, saling terkait dan tidak tumpang tindih antar program pembangunan.

Secara struktural, perekonomian Jawa Timur mempunyai empat sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan hotel restoran, dan sektor pertambangan dan penggalian. Meski cukup dominan,

sektor pertanian memiliki pertumbuhan relatif kecil sehingga *output*nya cenderung menurun. Kenyataan ini tidak mengejutkan mengingat elastisitas permintaan barang primer (termasuk pertanian) yang relatif kecil, serta perkembangan teknologi yang mengakibatkan cakupan sektor pertanian beralih menjadi sektor agroindustri.

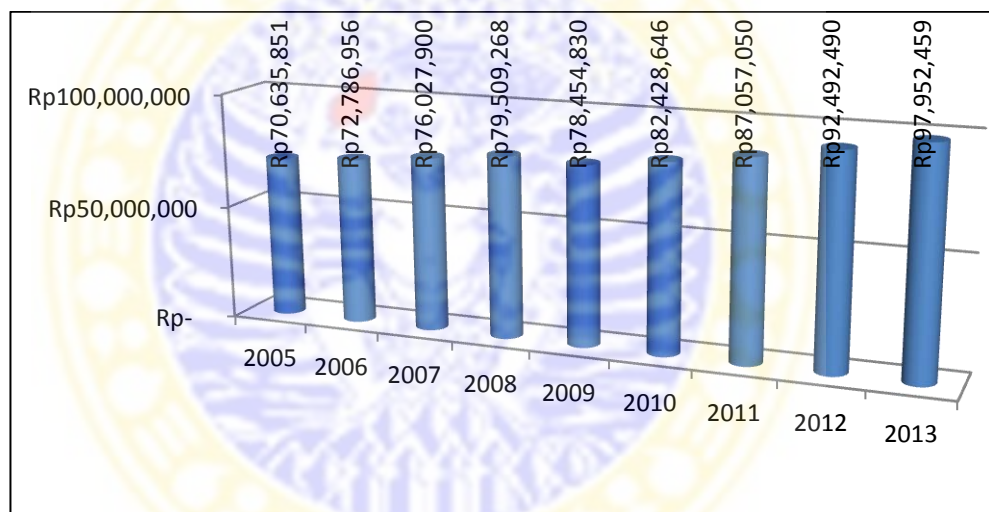


Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim, data diolah

Gambar 1.2.
Output Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 – 2013

Gambar 1.2. memperlihatkan perkembangan *output* sektor pertanian pada PDRB Jawa Timur selama periode 2005-2013. Perkembangan *output* sektor pertanian di Jawa Timur cenderung menurun, khususnya pada periode 2011-2013. Pada tahun 2011, *output* sektor pertanian masih mampu menyumbang sebesar Rp. 66,1 triliun dari PDRB, angka tersebut turun yaitu sebesar Rp. 64,6 triliun pada tahun 2013. Ada dua hal yang menyebabkan kondisi sektor pertanian di Jawa Timur terus mengalami penurunan, yaitu

penyebab pertamanya adalah terjadinya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian dimana per tahunnya rata-rata mencapai sebesar 65 ribu hektar (Ananda, 2010). Penyebab kedua adalah usaha pertanian sudah tidak lagi memenuhi *economic of scale* atau sektor pertanian telah terjadi *inefisiensi*, dimana antara biaya produksi dan harga jual tidak kompetitif sehingga kemiskinan di sektor pertanian inilah yang paling tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur (Susilo dan Tarsidin, 2008).

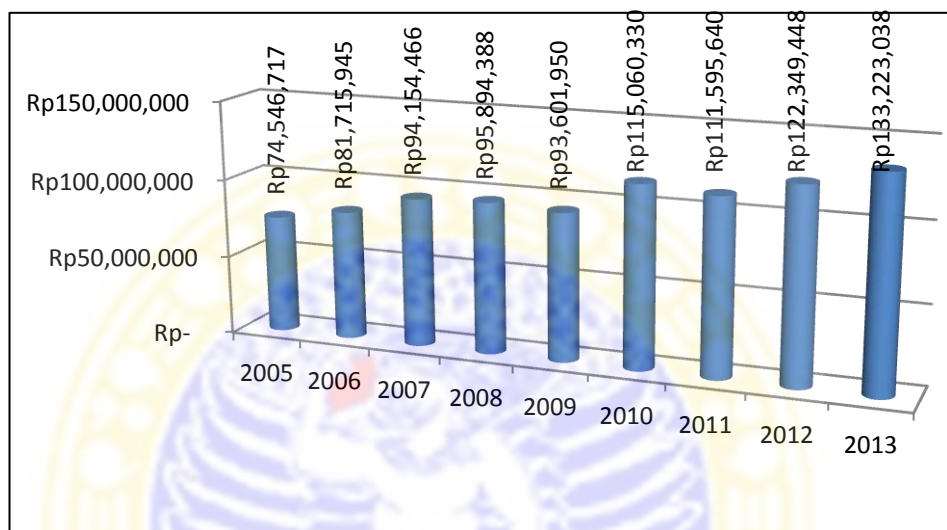


Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim, data diolah

Gambar 1.3.
Output Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 – 2013

Gambar 1.3. di atas, menunjukkan perkembangan *output* sektor industri pengolahan di Jawa Timur sedikit berbeda dengan sektor pertanian. Jika *output* sektor pertanian kenaikannya tidak terlalu besar, sedangkan *output* sektor industri pengolahan terhadap PDRB lebih besar dimana pada tahun 2005 *output* sektor industri pengolahan menyumbang sebesar Rp. 70,6 triliun

dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 97,9 triliun dari total PDRB. Tren kenaikan dari tahun 2005 sampai 2013 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan indikasi efisiensi di sektor industri.



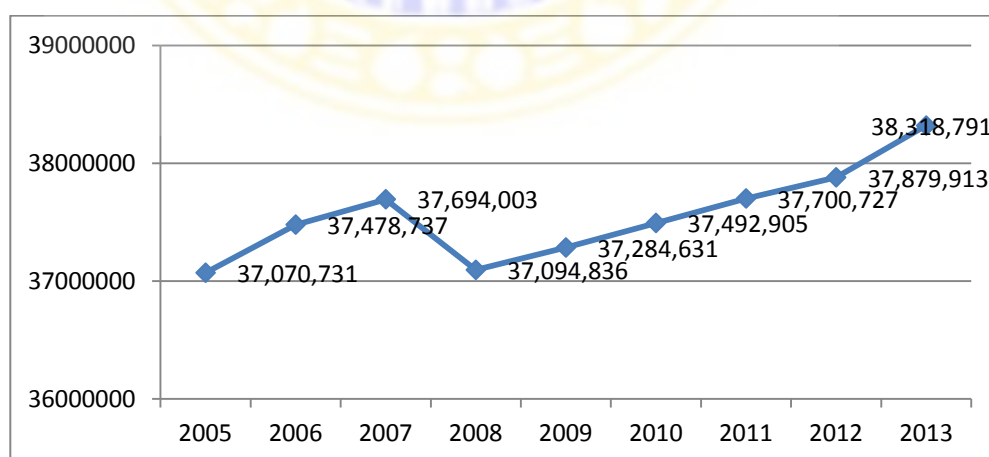
Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim, data diolah

Gambar 1.4.
Output Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2013

Gambar 1.4. di atas, menunjukkan perkembangan *output* sektor perdagangan, hotel dan restoran di Jawa Timur sedikit berbeda dengan *output* sektor pertanian dan *output* sektor industri pengolahan. Sebaliknya, perkembangan *output* sektor perdagangan hotel dan restoran justru mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, meskipun terjadi fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian di Jawa Timur yaitu dilihat dari pergerakan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder yang terlihat semakin membesar.

Pada tahun 2005, *output* sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang Rp. 74,5 triliun jauh melampaui *output* sektor pertanian dan industri pengolahan. Tren sektor ini terus meningkat signifikan di tahun 2013 hingga mencapai Rp. 133,2 triliun. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa *output* sektor industri pengolahan dan *output* perdagangan, hotel dan restoran telah menggeser peranan sektor pertanian dalam perekonomian daerah yang berkaitan dengan peralihan struktur perekonomian masyarakat Jawa Timur dari orientasi pada sektor primer (pertanian) kepada orientasi sektor sekunder (industri).

Peningkatan *output* sektor perdagangan, hotel dan restoran maupun *output* sektor industri pengolahan dan *output* pertanian terhadap pembentukan PDRB Jawa Timur merupakan tantangan baru yang harus dihadapi. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga dan meningkatkan *output* sektor pertanian dan *output* sektor industri pengolahan, memerlukan kebijakan yang cukup intensif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim, data diolah

Gambar 1.5.
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 – 2013 (orang)

Gambar 1.5. halaman 10 di atas memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur dari tahun 2005 hingga 2013, perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur periode 2005-2013 mengalami tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2005, penduduk Jawa Timur berjumlah 37 juta orang. Hingga tahun 2013, jumlah penduduk telah mencapai angka 38,3 juta orang. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur setiap tahunnya hampir sama dengan laju pertumbuhan ekonomi yaitu sekitar 5-6 persen. Kondisi ini memberikan arti bahwa laju pertumbuhan ekonomi manfaatnya diambil oleh pertumbuhan penduduk sehingga, ketika pertumbuhan ekonomi naik maka laju pengurangan kemiskinan cenderung tetap.

Pertumbuhan penduduk diyakini sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Malthus dalam Sukirno (2008;234) menyatakan sebuah teori tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi dimana jumlah penduduk di suatu tempat akan meningkat sangat cepat dengan mengikuti deret ukur dan persediaan pangan akan meningkat mengikuti deret hitung. Karena pertumbuhan persediaan pangan tidak dapat mengimbangi kecepatan penambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan cenderung menurun.

Menurut Malthus, untuk mengurangi kelangkaan bahan pangan maka jumlah penduduk harus di batasi, Malthus juga berpendapat bahwa tingkat pendapatan yang tinggi itu hanya akan mendorong lebih banyak anak. Menurutnya, ketika pendapatan perkapita meningkat, penduduk akan

meningkat lebih cepat yang pada gilirannya mengurangi pendapatan perkapita sampai ke tingkat subsistensi.

Todaro (2004:21) juga menyatakan bahwa salah satu konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah meningkatnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Kenaikan penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan per kapita di sebagian besar negara berkembang. Djojohadikusumo (1995:126) berpendapat bahwa, pembangunan ekonomi sebagai proses transisi dan transformasi pada perubahan struktural termasuk perubahan pada struktur dan komposisi produk nasional, kesempatan kerja produktif, ketimpangan antar sektor, antar daerah, antar masyarakat, kemiskinan dan kesenjangan antar golongan berpendapatan rendah dengan golongan yang berpendapatan tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami setiap *output* sektoral dalam merespon jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu daerah yang paling dinamis serta memiliki posisi penting secara ekonomi dan merupakan Provinsi terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan di atas penelitian ini akan menguji dan menganalisis masalah kemiskinan ini dengan judul “Pengaruh *Output* Sektor Pertanian, *Output* Sektor Industri Pengolahan dan *Output* Sektor Perdagangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh *output* sektor pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah ada pengaruh *output* sektor industri pengolahan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah ada pengaruh *output* sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *output* sektor pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *output* sektor industri pengolahan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *output* sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kegunaan Akademis

1. Media menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai informasi mengenai perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

B. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan persoalan pengaruh *output* sektor pertanian, *output* sektor industri pengolahan, *output* sektor perdagangan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.
2. Sebagai informasi dalam kaitan sinkronisasi kebijakan antar sektor dalam program penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan sektoral di Provinsi Jawa Timur.